

Laporan Evaluasi RKPD

Triwulan I



Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Balai Selasa, 03 April 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Metodologi..... 4

**BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA.....5**

BAB III KESIMPULAN 6

 3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD
 Kantor Camat Ranah Pesisir Triwulan I
 Tahun 2023..... 6

**LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Camat Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan
Triwulan I Tahun Anggaran 2023.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Desember 2022, fenomena pembangunan yang ada,

isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; c
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

1. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
2. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan masuk pada kategori Fungsi Penunjang Urusan, yaitu Fungsi Pelayanan Publik pada Masyarakat dan Nagari, Pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD Tahun 2021-2026. Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2023 pada triwulan ke-1 telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Implementasi pelaksanaan melalui 1 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.2.010.442.152.-

Pelaksanaan Progam, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan tahun ke-3 (tiga) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2023 menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah selaras baik dalam dokumen rencana kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kantor Camat Ranah Pesisir Triwulan I Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2023

No	Urusan	Target APBD 2022	Realisasi Keuangan s/d Bulan Maret 2023	Realisasi Thd Pagu
			Rp	%
	Kantor Camat Ranah Pesisir	2.010.442.152	366.182.834	18,21
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.010.442.152	366.182.834	18,21

Dari data realisasi keuangan Belanja Operasi Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan akhir bulan Maret 2023 (Triwulan I) secara keseluruhan dari target pagu Rp. 2.010.442.152 terealisasi sebesar Rp. 366.182.834 atau 18,21%. Capaian tersebut tergolong sedang, sehingga diperlukan perhatian dan upaya serius agar target akhir tahun dapat terealisasi.

Gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan I secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam buku ini. Tindak Lanjut pada triwulan berikutnya untuk memastikan ketercapaian sasaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat dioptimalkan.

Formulir E.81
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (2023) yang di evaluasi	Realisasi Keuangan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Tingkat CapaianKinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
								I		II		III		IV													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=7*13		15=14/8		
			KECAMATAN RANAH PESISIR			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				BELANJA DAERAH																							
				BELANJA LANGSUNG																							
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja		12.801.312.335		4.268.920.960		2.010.442.152		366.182.834							366.182.834		4.635.103.794		2,31		Kantor Camat Ranah Pesisir	
1		7.01.01.2.02	keg.	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan (bulan)		10.546.452.335		3.509.436.733		1.725.589.705		297.677.986							297.677.986		3.807.114.719		2,21		Kantor Camat Ranah Pesisir	
1		7.01.01.2.02.01	Sub.Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1020	10.291.452.335	204	3.424.400.712	192	1.681.842.151	45	289.419.478						45	289.419.478		3.713.820.190		2,21			
2		7.01.01.2.02.02	Sub.Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	840	255.000.000	168	85.036.021	84	43.747.554	21	8.258.508						21	8.258.508		93.294.529		2,13			
2		7.01.01.2.01	keg.	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		61.500.000		17.579.570		8.651.440		2.289.382							2.289.382		19.868.952		2,30		Kantor Camat Ranah Pesisir	
3		7.01.01.2.01.01	Sub.Keg.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	27.000.000	5	7.819.380	5	4.241.440	2	1.489.382						2	1.489.382		9.308.762		2,19			
4		7.01.01.2.01.07	Sub.Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	34.500.000	6	9.760.190	6	4.410.000	1	800.000						1	800.000		10.560.190		2,39			
3		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46.300.000		-	-	-																
5		Sub.Keg.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	46.300.000	1	-		-																	
4		7.01.01.2.06	keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		809.260.000		274.401.412		88.372.169		23.910.153							23.910.153		298.311.565		3,38		Kantor Camat Ranah Pesisir	

No	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (2023) yang di evaluasi		Realisasi Keuangan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat CapaianKinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV							
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/8	
6		7.01.01.2.06.01	Sub.Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	39.700.000	1	17.260.885	1	5.328.000	1	288.600					1	288.600		17.549.485	3,29			
7		7.01.01.2.06.04	Sub.Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	155.500.000	1	55.523.800	1	13.587.565	1	3.527.113					1	3.527.113		59.050.913	4,35			
8		7.01.01.2.06.05	Sub.Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	106.500.000	1	33.044.400	1	2.794.404	1	848.240					1	848.240		33.892.640	12,13			
9		7.01.01.2.06.06	Sub.Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18.000.000	24	6.300.000	24	1.800.000	-	-					-	-		6.300.000	3,50			
10		7.01.01.2.06.08	Sub.Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	197.560.000	12	71.552.327	12	21.584.200	3	9.581.000					3	9.581.000		81.133.327	3,76			
11		7.01.01.2.06.09	Sub.Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	292.000.000	12	90.720.000	12	43.278.000	3	9.665.200					3	9.665.200		100.385.200	2,32			
5		7.01.01.2.07	keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			395.000.000		49.906.000		41.356.012		-						-		49.906.000	1,21	Kantor Camat Ranah Pesisir		
12			Sub.Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	295.000.000	1	-		41.356.012		-												
13		7.01.01.2.07.05	Sub.Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	100.000.000	1	49.906.000	1	-		-					1	-		49.906.000	#DIV/0!			
6		7.01.01.2.08	keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.000.000		132.213.076		113.739.990		28.100.313					3	28.100.313		160.313.389	1,41	Kantor Camat Ranah Pesisir		
14		7.01.01.2.08.02	Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	150.000.000	12	50.487.626	12	24.300.000	3	6.469.863					3	6.469.863		56.957.489	2,34			
15		7.01.01.2.08.04	Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65	100.000.000	13	81.725.450	13	89.439.990	3	21.630.450					3	21.630.450		103.355.900	1,16			
7		7.01.01.2.09	keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			646.500.000		285.384.169		32.732.836		14.205.000						14.205.000		299.589.169	9,15	Kantor Camat Ranah Pesisir		
16		7.01.01.2.09.02	Sub.Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	324.000.000	2	126.412.130	2	27.372.836	2	14.205.000					2	14.205.000		140.617.130	5,14			
17		7.01.01.2.09.06	Sub.Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	22.500.000	10	8.262.039	10	2.300.000		-						-		8.262.039	3,59			
18		7.01.01.2.09.09	Sub.Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150.000.000		150.710.000	1	3.060.000		-						-		150.710.000	49,25			

No	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (2023) yang di evaluasi		Realisasi Keuangan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)		Tingkat CapaianKinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I	II	III	IV					
1	2	3	4		5	6		7		8		9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/8		
19			Sub.Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150.000.000	1	-											
2		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik		75.000.000		17.086.136								-	17.086.136	Kantor Camat Ranah Pesisir	
8		7.01.06.2.01	keg.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik		75.000.000		17.086.136								-	17.086.136	Kantor Camat Ranah Pesisir	
20		7.01.06.2.01.02	Sub.Keg.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	75.000.000	6	17.086.136								-	17.086.136		
3		Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan kecamatan		593.808.180		124.926.314								-	124.926.314	Kantor Camat Ranah Pesisir
9		7.01.02.2.04	keg.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			593.808.180		124.926.314								-	124.926.314	Kantor Camat Ranah Pesisir	
21			Sub.Keg.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10	93.808.180	5	-											
22		7.01.02.2.04.03	Sub.Keg.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15	500.000.000	3	124.926.314								-	124.926.314		
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		239.000.000		47.477.843								-	47.477.843	Kantor Camat Ranah Pesisir	
10		7.01.03.2.01	keg.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			239.000.000		47.477.843								-	47.477.843	Kantor Camat Ranah Pesisir	
23		7.01.03.2.01.01	Sub.Keg.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	56.000.000	10	21.032.480								-	21.032.480		
24		7.01.03.2.01.03	Sub.Keg.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	183.000.000	10	26.445.363								-	26.445.363		
5	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang		208.804.000		78.660.447								-	78.660.447	Kantor Camat Ranah Pesisir	

No	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (2023) yang di evaluasi	Realisasi Keuangan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun)	Tingkat CapaianKinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
								I	II	III	IV														
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13	14=7+13	15=14/8			
11		7.01.05.2.01	keg.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		208.804.000	78.660.447													-	78.660.447		Kantor Camat Ranah Pesisir		
25		7.01.05.2.01.03	Sub.Keg.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25	143.804.000	5	58.660.447											-	58.660.447				
26			Sub.Keg.	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	5	25.000.000	1	-																
27		7.01.05.2.01.08	Sub.Keg.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	40.000.000	12	20.000.000											-	20.000.000				
												Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)						18,21							
												Predikat Kinerja Program													
J U M L A H						13.917.924.515	4.537.071.700	2.010.442.152	366.182.834	-						366.182.834	4.903.254.534	2,44	Kantor Camat Ranah Pesisir						
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													
												Predikat Kinerja													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya																									

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
RANAH PESIR
PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH PESIR

SYAFIZAL S.Sos.,MAP

M.P. 19750403 200003 1 006